

Vol.2 No.2 Juli–Desember 2020

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH



**LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA (LP4MK)
PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
STKIP PGRI LUBUKLINGGAU**

Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Guest Editor

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Alamat:

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: jurnalsindang@gmail.com

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2020)

	Halaman
Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
1. Identitas Budaya: Berkeperibadian dalam Kebudayaan (Salah Satu Konsep Trisakti) Bung Karno disampaikan, 17 Agustus 1965) <i>Ida Bagus Brata, Rulianto, Adi Saputra</i>	84
2. Variabilitas Penggunaan Model Pembelajaran pada Kegiatan Pembelajaran Sejarah Peminatan Kelas X IPS di Kota Depok <i>Yusuf Budi Prasetya Santosa, Fahmi Hidayat</i>	94
3. Narasi Foto: Kehidupan Sosial Masyarakat Ulu Rawas Masa Kolonial Belanda 1825-1942 <i>Supian Ramli, Lagut Bakaruddin</i>	105
4. Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Kelurahan Bangun Jaya Tahun 1986-2012 <i>Belina Pasriana, Isbandiyah, Sarkowi</i>	113
5. Museum Majapahit di Tahun 2018-2019 sebagai Sarana Pendidikan dan Rekreasi serta Tempat Bersejarah <i>Ahmad Muhib Zuhairy</i>	124
6. Sejarah Teknik Pengobatan Kuno India (Ayurveda) <i>Imamatul Azizah, Riska Syafitri, Umy Kalsum</i>	139
7. Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830 <i>Vira Maulisa Dewi, Wiwin Hartanto, Rully Putri Nirmala Puji</i>	147
8. Dinamika Perkembangan Kebudayaan di Persia Kuno dan Mesir Kuno <i>Berliana Fatihatuz Fiizha, Mohammad Robby M, Rizky Apria Bakti</i>	159
9. Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Desa Widodo Kecamatan Tugumulyo Tahun 1980-2017 <i>Dwi Novita, Isbandiyah, Agus Susilo</i>	166
10. Keramik Situs Gede Ing Suro sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di SMK Muhammadiyah 03 Palembang <i>Riki Pratama Putera</i>	176

PANGERAN DIPONEGORO DALAM PERANG JAWA 1825-1830

Vira Maulisa Dewi, Wiwin Hartanto, Rully Putri Nirmala Puji
Universitas Jember

Alamat korespondensi: viiraayeollie@gmail.com

Diterima: 9 Mei 2019; Direvisi: 10 Juni 2020; Disetujui: 26 Juni 2020

Abstract

The Javanese war which erupted from 1825-1830 was one of the events that became the starting point of the beginning of colonialism in Java. The Javanese war became one of the major changes in the world in the late 18th and early 19th centuries. For the Javanese, especially in Surakarta and Yogyakarta, these periods were times that showed a decline in the Javanese order, especially in the palace. In addition, Dutch interference which was increasingly uncontrolled further worsened the situation. In Yogyakarta where Prince Diponegoro grew up to become a prince, this deterioration was increasingly apparent before the seconds of the Java War erupted. In the Java War, Prince Diponegoro served as one of the most important historical actors. Diponegoro who led the course of the Java War with his attitude and resistance to the colonial deserved high appreciation. In his resistance, Prince Diponegoro gained popular support as well as considerable involvement from the court which showed that Prince Diponegoro had considerable influence in the social life of society and the kingdom at that time. This rebellion was the first event of resistance faced by the Dutch Colonial Government which succeeded in changing the face of Java almost as a whole. The strategy and sacrifice given by Prince Diponegoro cannot be doubted. Although in the end the Prince Diponegoro succeeded in being defeated by the Dutch Colonial, this event had succeeded in fostering a spirit of unity and nationalism in the Javanese community.

Keywords: *Java War, Prince Diponegoro, colonialism.*

Abstrak

Perang Jawa yang meletus sejak tahun 1825-1830 merupakan salah satu peristiwa yang menjadi titik awal permulaan kolonialisme di Jawa. Perang Jawa menjadi salah satu bagian perubahan yang besar di dunia di akhir abad 18 dan awal abad 19. Bagi orang-orang Jawa khususnya di Surakarta maupun Yogyakarta, masa-masa itu merupakan masa yang memperlihatkan semakin merosotnya tatanan Jawa khususnya di dalam keraton. Ditambah lagi campur tangan Belanda yang semakin tidak terkendali semakin memperparah keadaan. Di Yogyakarta tempat Pangeran Diponegoro tumbuh menjadi seorang pangeran, kemerosotan ini semakin tampak nyata menjelang detik-detik meletusnya Perang Jawa. Didalam Perang Jawa, Pangeran Diponegoro berperan sebagai salah satu aktor sejarah yang sangat penting. Diponegoro yang memimpin jalannya Perang Jawa dengan sikap dan perlawanannya terhadap kolonial memang pantas mendapatkan apresiasi yang tinggi. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro mendapatkan dukungan rakyat dan juga keterlibatan yang cukup besar dari kalangan istana yang menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial masyarakat dan kerajaan pada masa itu. Pemberontakan ini merupakan peristiwa perlawanan pertama kali yang dihadapkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda yang berhasil mengubah wajah Jawa hampir secara keseluruhan. Strategi dan pengorbanan yang diberikan Pangeran Diponegoro memang tidak dapat diragukan lagi. Meski pada akhirnya pihak Pangeran Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Kolonial Belanda, namun peristiwa ini telah berhasil menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme pada diri masyarakat Jawa.

Kata Kunci: Perang Jawa, Pangeran Diponegoro, kolonialisme.

A. Pendahuluan

Diantara beberapa tokoh perjuangan abad ke-19, Pangeran Diponegoro menjadi salah satu sorotan publik karena peran pentingnya dalam memimpin perjuangan masyarakat Jawa kala itu. Banyak sekali karya tulis yang mengupas tentangnya, mulai dari latar belakang kehidupannya, agamanya, peran pentingnya dalam memimpin perjuangan melawan kolonial, strategi-strategi jitu dalam perlawanan, bahkan sampai masa dimana ia dibuang selama lima puluh tahun dan akhir kehidupannya. (Kanumoyoso, 2014)

Kehadiran Bangsa Belanda ke Jawa khususnya Yogyakarta menimbulkan beberapa polemik permasalahan sosial dan politik. Strategi-strategi yang diterapkan Belanda mampu membius pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, sehingga timbul kemerosotan moral di dalam keraton. Hal ini sangat disesalkan oleh Pangeran Diponegoro. (Carey, 2001) mengatakan Diponegoro menyesalkan kemerosotan moral di keraton, tempat para pejabat Belanda bertingkah laku secara leluasa dan adanya *affair* keputren. Hal yang lebih menyesalkan Diponegoro dan kalangan keraton adalah semakin kuatnya kekuasaan Belanda. Hal ini menjadi ancaman besar bagi keraton dan juga kehidupan masyarakat Jawa pada umumnya.

Sebenarnya kedatangan Belanda diterima oleh penguasa-penguasa Jawa, karena keberadaan Belanda dapat memperkuat kekuasaan mereka. Hal ini terjadi karena Belanda menjamin kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa Jawa. Akan tetapi, semakin lama dan semakin erat hubungan di antara keduanya, Belanda semakin bertindak semena-mena. Belanda mulai berani masuk dan mencampuri urusan dalam keraton sehingga timbul perpecahan di dalam keraton. Namun, di sisi lain kehadiran Belanda juga mendukung kedudukan raja yang menjadi lebih mutlak disamping mengundang perpecahan. (Carey, 2001)

Pangeran Diponegoro yang masih keturunan keluarga keraton Kesultanan Yogyakarta, tentu saja tidak terima dan merasa geram melihat kejadian-kejadian yang ada di dalam keratonnya. Ia merupakan sosok yang memegang teguh ajaran Islam dan memiliki semangat perjuangan yang tinggi. (Carey, 2001) mengatakan bahwa keyakinan Pangeran Diponegoro yang tidak tergoyahkan pada Allah SWT dan kebenaran firman-Nya seperti yang telah disampaikan oleh utusan-Nya merupakan kunci untuk memahami watak dan cita-cita perjuangan yang dimilikinya.

Kekuasaan Belanda di dalam keraton yang semakin kuat menambah berbagai permasalahan. Keberatan-keberatan dan penderitaan-penderitaan sosial serta ekonomi yang dirasakan semakin mendalam oleh penduduk di Jawa Tengah, di ambang meletusnya Perang Jawa terjadi peristiwa-peristiwa politik di Yogyakarta.

Permasalahan-permasalahan di luar keraton juga semakin kompleks. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Eropa membuat rakyat semakin terbebani. Taktik licik yang dilakukan Belanda dengan mempengaruhi beberapa punggawa keraton berhasil memperkeruh keadaan. Perpecahan-perpecahan di antara keluarga keraton semakin nampak jelas. Hal ini menjadikan Belanda memiliki celah yang lebih luas untuk masuk dan ikut mencampuri urusan dalam keraton.

Masuknya pengaruh barat ini membuat rakyat semakin tertindas dan kehormatan tradisi Jawa semakin hilang. Hal ini membuat pendirian Pangeran Diponegoro semakin kuat mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu, yaitu merebut kembali Pulau Jawa dan mengembalikan tatanan-tatanan Jawa yang hampir hilang ditelan zaman. Semakin lama pelanggaran terhadap norma-norma kehidupan Jawa dan Islam semakin meraja lela, yang ada justru tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh orang asing yang telah berhasil menguasai tanah milik kerajaan

melalui kebijakan sewa tanan yang telah diterapkan. Karena Pangeran Diponegoro berpegang teguh terhadap teladan Islam, ia mengatakan bahwa ini adalah pertanda tanah Jawa telah jatuh ke tangan orang kafir. Oleh sebab itu harus direbut dengan sabil yang berlandaskan Qur'an. (Djamhari, 2014)

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubowono IV (1814-1822) merupakan masa keemasan masuknya pengaruh budaya Eropa di Jawa. Terlihat dari penyewaan tanah kerajaan dan *apanage* kepada penyewa asing, pengumpulan pajak serta pungutan bea lainnya secara besar-besaran. Sultan IV termasuk dalam kelompok kerajaan yang sekuler. Ia mempunyai watak yang kurang terpuji, suka hidup mewah, dan meniru gaya hidup orang Belanda. Sikap ini tidak disukai oleh bangsawan kelompok Kasepuhan. Pangeran Diponegoro seringkali mengingatkan adiknya supaya kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan tatanan dan norma Jawa serta agama. Selain itu Pangeran Diponegoro juga mengingatkan supaya tidak mengambil keputusan dengan semena-mena sehingga tidak merugikan orang banyak, yang dirancang oleh kelompok Danurejo-Wironegoro. Akan tetapi, nasehat yang diberikan oleh Pangeran Diponegoro tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Hamengkubowono IV. (Djamhari, 2014)

Sultan Hamengkubowono IV meninggal pada usia 18 tahun ketika sedang makan yang kemungkinan diracuni. Kemudian secara diam-diam kelompok Danurejo-Wironegoro menuduh Pangeran Diponegoro sebagai dalang pembunuhan sang Sultan. Bagi pemerintah, persoalan wafatnya sultan tidak menjadi permasalahan penting. Permasalahan yang penting adalah mencari penggantinya. (Djamhari, 2014)

Kemudian Sultan Hamengkubowono IV digantikan oleh putra mahkota yang masih anak-anak baru berusia tiga tahun. Karena sultan yang masih anak-anak, maka perwalian atas sultan dipercayakan kepada Ratu Ibu dan ibu Sultan sendiri, yaitu Ratu Kencana, bersama-sama dengan Pangeran

Diponegoro dan paman Diponegoro yaitu Pangeran Mangkubumi. Namun, para wali ini hanya mempunyai wewenang melakukan pengawasan atas masalah-masalah keuangan di dalam keraton saja, sementara pelaksanaan pemerintahan Sultan tetap berada di tangan *patih*, yang terus memerintah dibawah pengawasan umum residen Belanda. (Carey, 2001)

Dengan pemimpin keraton yang semakin ruwet membuat keadaan juga semakin tidak karuan. Menurut M. C. Ricklefs dalam bukunya *The Seen and Unseen Worlds in Java* yang dikutip dalam bukunya Saleh As'ad Djamari (Djamhari, 2014) menyatakan bahwa pada Februari 1823, pejabat residen dari pemerintah kolonial yang bernama Baron de Salis digantikan oleh Residen Smissaert. Pada masa ini wibawa keraton semakin hilang karena pejabat Belanda bebas berbuat sesukanya dan kurang ajar terhadap kerabat Kesultanan. Mereka sama sekali tidak menghormati adat istiadat Jawa.

Pangeran Diponegoro semakin merasa prihatin dengan tingkah laku pejabat Belanda yang semakin mudah masuk keraton dan mengadakan hubungan gelap dengan beberapa putri keraton. Hal itu dapat terjadi karena komandan pasukan pengawal keraton, Mayor Wironegoro yang merupakan kerabat dari Patih Danurejo IV, tidak melarang mereka. (Djamhari, 2014). Beberapa konflik-konflik di atas merupakan cikal bakal meletusnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan pemerintah kolonial Belanda yang semakin bertindak semena-mena.

Pada titik ini, kualitas seni Perang Diponegoro melebihi rata-rata dengan kondisi sosial yang tidak mendukung. Tingkat pengetahuan dan kedekatan secara personal seorang pangeran dengan rakyat Yogyakarta sedari kecil menjadi tumpuan referensial dalam mengatur strategi melawan Belanda. Kekuatan serangan dari pihak rakyat tidak akan diperoleh tanpa adanya seni perang ulung. Bagaimana tidak, rakyat biasanya yang awalnya enggan

melakukan perlawanan kemudian bangkit dengan semangat juang tinggi untuk mempertahankan tradisi mereka yang hampir hilang karena tertindas oleh kebijakan-kebijakan orang Barat.

Topik Perang Jawa dipilih karena merupakan peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Jawa khususnya dan Indonesia umumnya. Dari peristiwa ini dapat dilihat semangat nasionalisme, patriotism dan anti nasional di kemudian hari. Pangeran Diponegoro menunjukkan sikapnya yang anti budaya Barat, ia tidak menyukai kedatangan budaya Barat yang menambah penderitaan rakyat Jawa. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Bangsa Barat sangat membuat rakyat sengsara, sementara pemimpin keraton hidup dengan pengaruh budaya Barat tersebut.

Topik pembahasan dalam penelitian ini adalah Kebangkitan Pangeran Diponegoro pada Masa Kolonial Belanda dan terfokus pada peran Pangeran Diponegoro dalam jalannya Perang Jawa. Penelitian ini dilakukan untuk merekonstruksi peran Pangeran Diponegoro dalam memimpin Perang Jawa sehingga perang melawan Belanda dapat terjadi dengan strategis. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pangeran Diponegoro untuk rakyat Jawa khususnya Yogyakarta.

Topik Perang Jawa dipilih karena merupakan peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Jawa khususnya dan Indonesia umumnya. Dari peristiwa ini dapat dilihat semangat nasionalisme, patriotisme dan anti penjajahan serta sebagai awal pergerakan nasional di kemudian hari. Pangeran Diponegoro menunjukkan sikapnya yang anti budaya Barat, ia tidak menyukai kedatangan budaya Barat yang menambah penderitaan rakyat Jawa. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Bangsa Barat sangat membuat rakyat sengsara, sementara pemimpin keraton hidup dengan pengaruh budaya Barat tersebut.

Topik pembahasan dalam penelitian ini adalah Kebangkitan Pangeran

Diponegoro pada Masa Kolonial Belanda. Penelitian ini dilakukan untuk merekonstruksi peran Pangeran Diponegoro dalam memimpin Perang Jawa sehingga perang melawan Belanda dapat terjadi dengan strategis. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pangeran Diponegoro untuk rakyat Jawa khususnya Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan yang ingin dipecahkan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut.

1. Sejarah terjadinya Perang Jawa 1825-1830,
2. Peran Pangeran Diponegoro dalam proses berjalannya Perang Jawa,
3. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya Perang Jawa.

B. Metode Penelitian

Sistematika metode penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai topik yang akan dibahas menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa berupa sumber dokumen yang meliputi: buku, jurnal, dan artikel yang relevan.

Metode yang pertama adalah heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *Heuriskein* yang artinya memperoleh (Sugiyanto, 2010) sehingga dalam penulisan artikel ini penulis mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain dari buku-buku pustakaan, artikel, internet. sebagai titik tolak bagi penulisan penelitian. Heuristik merupakan proses mencari dan menggali sumber-sumber yang relevan. Dalam mencari sumber-sumber yang relevan, peneliti memanfaatkan perpustakaan dan media elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian berbasis pustaka.

Setelah mendapatkan beberapa sumber yang sesuai, langkah selanjutnya adalah menguji kebenaran

sumber tersebut atau yang disebut dengan metode sejarah kritik. Kritik ini bisa berupa kritik ekstern dan kritik intern. Kritik intern adalah menguji kevalidan atau kebenaran isi dokumen, buku ataupun jurnal. Sedangkan kritik ekstern adalah kritikan yang berkaitan dengan penulis atau pengarang dokumen tersebut.

Setelah mengkritik sumber, langkah yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi yaitu menghubungkan atau mengaitkan dengan sumber-sumber lain yang relevan. Setelah dirasa mendapatkan sumber yang cukup dan relevan dengan topik yang akan dibahas, langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan kisah sejarah tersebut. Penulisan kisah sejarah ini disebut dengan historiografi.

Historiografi merupakan tahap terakhir yang berupa merekonstruksi peristiwa sejarah. Data-data yang relevan dirangkai menjadi satu kesatuan untuk menggambarkan peristiwa masa lampau mendekati peristiwa sesungguhnya (Louis Gottschalk 2008:39).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis dan filosofis. Pendekatan historis akan menjelaskan secara deskriptif bagaimana sejarah terjadinya Perang Jawa, apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Jawa secara umum. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk mengelaborasi pemikiran pangeran Diponegoro di satu sisi dengan Perang Jawa dan di sisi lainnya. Di antara keduanya terdapat suatu proses yang menyebabkan Perang Jawa menjadi peristiwa yang menghentak Belanda, karena dengan kondisi keraton yang tidak stabil Pangeran Diponegoro berhasil memimpin rakyat Jawa untuk melawan Belanda.

C. Pembahasan

Perang Jawa yang terjadi sejak tahun 1825-1830 merupakan suatu garis pemisah dalam sejarah Pulau Jawa dan bahkan seluruh Indonesia. Untuk

pertama kalinya pemerintah kolonial menghadapi usaha pemberontakan sosial, yang mencakup suatu bagian yang besar di pulau tersebut. Hampir 200.000 orang Jawa tewas dalam peperangan dan seperempat dari luas tanah di pulau tersebut mengalami kerusakan yang hebat. Selain itu, pihak Belanda juga mendapatkan penderitaan sebagai akibat dari peperangan yaitu 8.000 orang pasukan Eropa serta 7000 orang pasukan Indonesia terbunuh, serta Belanda menghabiskan dana sekitar 20 juta gulden untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam Perang Jawa. Jadi, pada dasarnya antara kedua belah pihak juga mengalami kerugian material maupun non material (Carey, 2001: 1).

Sejarah meletusnya Perang Jawa tidak dapat dilepaskan dengan sejarah pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan ini berdiri sejak tahun 1755 sebagai hasil dari penaklukan militer. Terdapat pembagian wilayah yaitu antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta dengan Kesunanan Surakarta. Sudah lama kesultanan ini melakukan hubungan dengan Kompeni Hindia Timur Belanda, bahkan Mangkubumi sebagai sultan pertama mengetahui kelemahan Belanda yang baru saja tumbuh tersebut. Akan tetapi, menurutnya daripada menantang mereka, ia justru melakukan permainan yang cerdas dengan penuh kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kompeni tersebut. Ketika Mangkubumi meninggal dunia pada tahun 1792, Yogyakarta sudah mapan sebagai sebuah negara makmur yang mampu meredupkan saingannya yaitu Kesunanan Surakarta (Carey, 2001: 4).

Namun, sayang sekali setelah sepeninggal Mangkubumi dan digantikan oleh anaknya, Sultan Hamengkubowono II ini melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh ayahnya. Bahkan dalam jangka waktu satu dekade saja (1792-1800) kebanyakan para penasehat

Mangkubumi telah diberhentikan dan digantikan dengan penasehat yang lebih muda namun tidak berpengalaman. Semakin lama banyak terjadi persengkokolan di dalam keraton dan berkembang menjadi kondisi yang semakin membahayakan. Selain itu, Sultan II ini juga menerapkan gaya pemerintahan yang kejam, seperti: pemasukan melalui pajak dilipatgandakan sebesar enam kali dan untuk mendapatkan pajak tersebut dilakukan dengan cara pemerasan, bersifat acuh tak acuh terhadap residen Belanda karena ia mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh Kompeni Hindia Timur Belanda tersebut, hal ini kemudian menimbulkan kritik dari para residen Belanda (Carey, 2001: 5-6).

Kesultanan Yogyakarta merupakan negara yang sangat luas dan kaya dengan batas-batas wilayahnya dengan negara di sekitarnya yang sangat jelas. Akan tetapi,, pada abad ke-19, perbatasan tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis. Ini dikarenakan Sultan Hamengkubuwono II yang terkenal pemberani tidak mampu menghadapi tekanan Daendels dan terpaksa menyerahkan beberapa daerahnya. Beberapa wilayah yang diserahkan termasuk wilayah *nagara agung* yang strategis dan kaya akan kayu jati, seperti Grobogan, Wirosari, Selo, Warung, Jipang dan Japan.

Sejak R. M. Sundoro diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono II, suasana tenang yang sebelumnya telah diciptakan pada masa pemerintahan ayahnya berubah dengan begitu cepat. Ia memiliki karakter yang sangat bertolak belakang dengan ayahnya. Pada masa pemerintahannya banyak sekali konflik yang terjadi dengan pihak kompeni maupun konflik internal keraton. Di dalam keraton, intrik dilakukan oleh Ratu Kencono Wulan (salah seorang istri Sultan) dan pangeran Notokusumo (adik Sultan) yang membenci putra mahkota. Mereka menuduh putra mahkota sebagai orang yang taat terhadap kompeni. Di waktu yang hampir bersamaan, Sultan pun memecat Patih Danurejo II.

Karena banyaknya tindakan persengkokolan dan penyalahgunaan jabatan, Daendels kemudian menggantikan Sultan Hamengkubuwono II dengan putra mahkota pada tahun 1810 dan mengangkat kembali Patih Danurejo II (Djamari, 2004: 21). Setelah memperoleh kemenangan atas Kesultanan Yogyakarta, pada Mei 1811 Daendels digantikan oleh Janssens.

Janssens kemudian memindahkan markas komandonya ke Semarang dan meninggalkan garis pertahanan yang dibangun Daendels di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pada 18 September 1811, Janssens menyerah kepada Inggris dan menandatangani Naskah Kapitulasi Tuntang. Beberapa hari setelah Kapitulasi Tuntang, pihak Inggris mengirim Robison ke Yogyakarta untuk menegaskan semua perjanjian yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Daendels dan menyatakan tetap berlaku. Hal ini dimanfaatkan oleh Sultan Hamengkubuwono II untuk mengambil alih kembali kekuasaan dari putra mahkota, anaknya sendiri (Djamari, 2004: 21-22).

Konflik-konflik internal dan eksternal seperti ini terus terjadi sampai kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Awalnya kedatangan VOC disambut baik oleh para pejabat keraton, akan tetapi semakin lama VOC justru menusukkan duri dari belakang. VOC mulai berani mencampuri urusan dalam keraton sehingga menambah keruh konflik internal Kesultanan Yogyakarta. Para punggawa keraton mulai kehilangan tradisi, adat istiadat Jawa mereka karena mereka justru cenderung mengikuti kebijakan norma-norma Barat yang dibawa oleh Belanda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada diri Pangeran Diponegoro.

Sebagai pembawa gagasan revolusi Perancis, Daendels melakukan reorganisasi dengan memasukkan elit Jawa ke dalam sistem administrasi kolonial dan meletakkan landasan pemerintahan yang lebih modern. Perubahan-perubahan besar yang menyebabkan terguncangnya tatanan

Jawa membuat Pangeran Diponegoro merasa prihatin melihat keadaan negaranya. Salah satu tuntutan yang diberikan Pangeran Diponegoro adalah kembalinya tatanan Jawa seperti sebelum adanya reformasi yang dilakukan Daendels pada tahun 1808. (Kanumoyoso, 2014)

Dalam pandangan masyarakat Jawa pada abad ke-19, Pangeran Diponegoro dianggap sebagai Ratu Adil. Aspek Sultan Agung sebagai seorang raja yang arif bijaksana sejarah Jawa juga mempunyai makna yang sangat besar bagi Pangeran Diponegoro. Memang banyak tingkah laku sang pangeran sebagai seorang pemimpin selama berlangsungnya Perang Jawa, yang memiliki persamaan dan ideal dengan sifat seorang raja yang arif dan bijaksana yang dimiliki oleh orang Jawa. Di dalam istilah Jawa tradisional, raja ideal itu adalah raja yang akan selalu mencari petunjuk dan tuntutan batin dari Tuhan. Ia akan bermeditasi dan merenungkan keinginan-keinginan pribadinya kepada Roh Yang Maha Suci (Carey, 2018: 30).

Sebagai seorang yang dianggap Ratu Adil, Pangeran Diponegoro berhasil menyatukan berbagai elemen sosial berbeda dibawah naungan cita-citanya yang Islam Jawa. Karena pengaruh Barat yang semakin merajalela dan pemimpin keraton yang kehilangan pegangan, membuat rakyat kehilangan pemimpin yang bisa mengayomi mereka. Hal ini menyebabkan rakyat berpaling ke Pangeran Diponegoro yang justru mengerti dan lebih memerhatikan keadaan dan kebutuhan rakyat. Masyarakat melihat bahwa Pangeran Diponegoro adalah sosok yang bisa memandu mereka melewati masa transisi yang sulit ini menuju masa kejayaan. Pesona yang dimiliki Pangeran Diponegoro adalah ia mampu memposisikan diri ditengah-tengah masyarakat yang saat itu mengalami penderitaan dan kehilangan sosok pemimpin yang mampu mengayomi ditengah pengaruh penetrasi Barat yang semakin masuk kedalam kehidupan mereka. Keadaan seperti ini terjadi sejak

masa pemerintahan residen Daendels (Kanumoyoso, 2014: 7).

Sejak Daendels berkuasa, maka wilayah kekuasaan raja-raja Jawa, terutama Yogyakarta dan Surakarta, makin dipersempit. Hal ini disebabkan karena banyak daerah yang diberikan kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuannya. Adapun daerah yang diinginkan Belanda adalah daerah pantai utara Jawa. Karena itu daerah-daerah tersebut berangsur-angsur diambil-alih oleh Belanda. Daerah Kerawang dan Semarang dikuasai oleh Belanda pada tahun 1677, dan pada tahun 1743 daerah Cirebon, Rembang, Jepara, Surabaya, Pasuruan dan Madura. Dengan hilangnya daerah-daerah pesisir, kerajaan Mataram makin melepaskan kegiatan pelayaran dan perdagangannya, dan memusatkan kegiatannya pada bidang pertanian. (Wiharyanto, n.d.)

Perpecahan di kalangan keluarga kerajaan di Mataram tidak saja melemahkan kerajaan, tetapi juga menyebabkan pengaruh Belanda makin menjadi kuat. Setiap pertentangan antar keluarga bangsawan di kraton akan mengundang campur tangan pihak Belanda, yang pada akhirnya merugikan kerajaan itu sendiri sebagai keseluruhan. Pada masa Daendels terdapat usaha mencampuri urusan tatacara di istana. Misalnya, Daendels menghendaki persamaan derajat dengan Sultan pada waktu upacara kunjungan resmi diadakan di kraton. Dalam upacara tersebut pembesar Belanda supaya diijinkan duduk sejajar dengan raja, dan sajian sirih supaya dihapuskan. Raffles juga meneruskan usaha yang sama terhadap kehidupan kraton. Kondisi seperti itu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidaksenangan di antara beberapa golongan bangsawan. (Wiharyanto, n.d.)

Peristiwa terdekat sebelum meletusnya Perang Jawa adalah konflik antara Pangeran Diponegoro dengan Smissaert, konflik politik ini mencapai puncaknya dengan penutupan jalan ke Tegalrejo, yaitu tempat kediaman Pangeran Diponegoro. Kemudian para

pengikut Pangeran Diponegoro mencabut pancang-pancang yang digunakan untuk menutup jalan tersebut. Insiden pancang dan penutupan jalan menjadi konflik terbuka antara Smissaert-Danurejo melawan Pangeran Diponegoro, yang melibatkan kekuatan bersenjata. Pangeran Diponegoro mendapat simpati dari berbagai golongan masyarakat. Mereka berkumpul di Tegalrejo untuk membantu Pangeran Diponegoro melawan koloni Belanda dan orang Cina dalam perang sabil (Djamari, 2004: 34-35).

Mengetahui hal ini, Residen Smissaert menuduh Pangeran Diponegoro bahwa kedatangan rakyat dan berkumpul di Tegalrejo adalah upaya yang dilakukan Diponegoro untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Pangeran Diponegoro menolah tuduhan tersebut, menurutnya, rakyat berkumpul atas kemauannya sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Kemudian *Dalem* Tegalrejo dihancurkan dan dibakar. Namun sebelumnya Pangeran Diponegoro sudah berhasil melarikan diri ke Selarong yang merupakan tempat yang secara diam-diam sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya sebagai tempat persembunyiannya. Pada akhir Juli 1825, di Selarong telah berkumpul beberapa orang bangawan Yogyakarta. Kemudian mereka bersama-sama menyusun strategi dan langkah-langkah taktis untuk memastikan sasaran yang akan diserang (Djamari, 2004: 34-35).

Struktur pimpinan perlawanan Diponegoro meliputi dari yang tertinggi Pramudeng Prang (Sultan Ngabdulkamid Herucokro Kabirul Mukminim Sayidin Panotogomo Senopati ing Ngalogo Sabilullah, yaitu Pangeran Diponegoro sendiri). Panglima Tentara adalah Alibasah Ngabdul Mustapa Sentot Prawirodirjo. Komandan untuk kewilayahan perang (mandala) Pajang, Yogyakarta, dan Bagelen, berturut-turut Alibasah Kasan Besari, Alibasah Sumonegoro, dan Pangeran Diponegoro. (Mustarom, 2017)

Kondisi masyarakat pada awal Perang Jawa tidak stabil karena semakin berat beban yang harus ditanggung oleh rakyat karena semakin meluasnya pengaruh Belanda pada kehidupan rakyat. Tanam paksa semakin memberatkan rakyat ditambah dengan beban pajak tanah yang harus dibayarkan, sementara para pejabat pribumi hanya memperkaya diri sendiri dan menghamburkan kekayaan mereka dengan pergi ke tempat pelacuran dan menghisap candu tanda memikirkan penderitaan yang dialami rakyatnya. Kondisi seperti ini menimbulkan kesenjangan sosial antara rakyat dengan para pemimpin mereka. (Kuncoro, 2013).

Banyak kesulitan yang harus dihadapi oleh Belanda pada awal masa perang Jawa (1825-1827). Mulai dari jumlah pasukan yang hanya 3 resimen (satu resimen infanteri, satu resimen huzar, dan satu resimen artileri), ditambah legion Mangkunagoro yang jumlahnya sekitar 1.800 orang. Pasukannya tersebut juga tidak mengenal medan (*terrain*) dengan baik. Tidak ada peta yang lengkap dan hampir semua peta yang tersedia berada dalam kondisi buruk dan cacat. Padahal sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta berbukit-bukit. Pasukan yang sebagian besar tidak mengenal medan menjadi faktor penghambat mobilitas. Kondisi cuaca juga tidak menguntungkan karena musim kemarau dan hujan berganti tidak menentu. Selain itu, karakter pemberontak yang mereka hadapi terkenal pemberani dan fanatik. Mereka sangat membenci orang Eropa dan Cina. (Mustarom, 2017)

Secara garis besar, strategi Diponegoro adalah merebut wilayah kesultanan, lalu mengusir Belanda dan orang Cina keluar dari wilayah Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ia bercita-cita untuk mengembalikan kembali tatanan dan norma-norma Jawa yang ada di dalam keraton dan masyarakat Jawa. Serbuan pasukan Diponegoro mengejutkan tentara Hindia Belanda dan membuat panic para pembesar

kesultanan dan pemerintah Hindia. Residen Smissaert segera melaporkan kepada Jenderal de Kock karena kekuatan yang sangat tidak seimbang. Dalam penyerbuan itu, pasukan Diponegoro juga menjarah gudang-gudang logistik dan mengangkutnya ke luar kota. Penjarahan mengakibatkan sebagian besar penduduk Yogyakarta mengalami kekurangan bahan pangan. Sultan Hamengkubuwono V berhasil diamankan, sedangkan Keraton Yogyakarta berhasil dipertahankan oleh pasukan pengawal keraton tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti. Pasukan Diponegoro berhasil menduduki Yogyakarta selama tujuh hari (Djamari, 2004: 43-44).

Kemudian de Kock ditugaskan sebagai Komisaris Pemerintah untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Yogyakarta, ia diberi kekuasaan penuh atas kedua daerah tersebut untuk menumpas pemberontakan. De Kock sadar bahwa ia harus bekerja keras mengatasi berbagai kesulitan. Ia mengumpulkan semua pasukannya yang berada di berbagai wilayah di Nusantara untuk berkumpul di Jawa. Selanjutnya Jenderal de Kock merencanakan operasi besar-besaran untuk merebut kembali Yogyakarta dan menghancurkan markas besar Pangeran Diponegoro di Selarong, dengan persiapan yang matang dan cermat. De Kock mengirimkan surat kepada Pangeran Diponegoro di Selarong, dan kemudian pihak Diponegoro pun mengirimkan balasan. Setelah menerima balasan surat dari Pangeran Diponegoro, de Kock segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Selarong. Akan tetapi, ternyata Selarong sudah kosong, Pangeran Diponegoro beserta pasukannya sudah melarikan diri dari Selarong. Hal ini membuat peperangan semakin berlarut-larut (Djamari, 2004: 43-44).

Operasi pengejaran selama dua tahun yang dipimpin oleh Jenderal de Kock, secara militer tidak mengalami kemajuan. Operasi itu ternyata memberi pengalaman kepada prajurit NOIL

untuk mengenal medan karena selama hampir Sembilan tahun sejak 1816 Pulau Jawa selalu dalam keadaan aman dan tenteram. Memang ada beberapa pangeran pemimpin pasukan Diponegoro yang berhasil ditawan atau menyerah, namun peristiwa itu sangat langka. Hingga 1826, para pejabat sipil menilai bahwa operasi-operasi militer tidak mengalami kemajuan, bahkan tidak menyelesaikan masalah. Sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta tetap berada di tangan Pangeran Diponegoro (Djamari, 2004: 43-44).

Kekalahan Diponegoro pada tahun 1830 membuka jalan bagi pengenalan '*Cultivation System*' yang digulirkan oleh Johannes van den Bosch (1830-1877), dimana produk Jawa dibeli oleh negara kolonial Belanda dengan harga tetap yang rendah dan kemudian dijual di pasar dunia sesuai dengan harga internasional, sebuah sistem yang memberikan penghasilan bersih kepada Belanda sebesar 832.000.000 gulden (setara dengan USD75 miliar uang hari ini) sehingga meringankan beban transisi negara tersebut menuju ke ekonomi industri modern. Perkembangan pasca-Perang Jawa semakin membenarkan keprihatinan Diponegoro atas ketidakadilan perdagangan antara Jawa dan kekuasaan kolonial Belanda. (Mustarom, 2017).

(Mustarom, 2017) mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang, Belanda secara tak terbantahkan menguasai pulau Jawa dan sebuah fase baru pemerintah kolonial Belanda dimulai dengan diberlakukannya "sistem tanam paksa" (*cultuur stelsel*) pada tahun 1830-1870 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch (menjabat antara 1830-1834). Hal ini menjadi tanda bahwa benar-benar dimulainya penjajahan Belanda yang sesungguhnya di tanah Jawa. Keadaan rakyat semakin tertindas, ditambah dengan pengasingan terhadap Pangeran Diponegoro.

Pada tahun 1830, selain Pangeran Diponegoro, juga Susuhunan Surakarta, Pakubuwono VI, diasingkan oleh

Belanda ke luar Jawa yaitu ke Ambon dan sampai meninggal pada tahun 1849. Sedangkan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Batavia kemudian dipindahkan ke Manado pada 7 Mei dan tiba di Ambon pada 12 Juni 1830. Enam tahun setelah wafatnya Susuhunan Pakubuwono VI, Pangeran Diponegoro menyusulnya pada 8 Januari 1855 di Makassar. Pengasingan yang dilakukan terhadap Sunan Pakubuwono VI atas dasar meskipun ketika Perang Jawa berlangsung, Keraton Surakarta resmi menjadi bagian Belanda, tetapi Sunan Pakubuwono VI dicurigai mendukung Pangeran Diponegoro. Selain itu ia juga menunjukkan dengan jelas sikap ketidaksenangannya terhadap Belanda. Beberapa hal inilah yang kemudian memicu pengasingan terhadap Sunan Surakarta tersebut (Swantoro, 2002: 94).

Dengan demikian, perang ini menandai berakhirnya sebuah proses yang matang sejak periode Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Termasuk perubahan sejak dari era Serikat Perusahaan Hindia Timur atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1799, ketika kontak-kontak antara Batavia dan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan telah terjalin diantara para pejabat setingkat duta besar sebagaimana layaknya terjadi di antara negara-negara berdaulat, menuju periode "puncakkolonial" ketika para raja akhirnya menduduki posisi sebagai bawahan atau subordinat terhadap kekuasaan kolonial Eropa. (Mustarom, 2017)

Kegiatan perlawanan militer Diponegoro adalah dalam rangka penegakan Balad al Islam (negara Islam). Dalam pandangan Diponegoro dan pasukannya, perang yang mereka lakukan melawan Belanda dan sekutunya adalah sebuah jihad, yaitu berperang melawan kaum kafir yang telah melakukan penyerangan, pengusiran, dan perampasan terhadap umat Islam, dan juga berperang melawan orang-orang murtad, yaitu orang Islam yang membantu orang kafir dalam memusuhi dan melakukan agresi

terhadap umat Islam. Dalam masa itu, kata sabil dan sabilillah yang mempunyai makna spesifik, digunakan untuk menggantikan kata jihad. Kata sabil maupun sabilillah merupakan sebutan ringkas dari kata jihad *fi sabilillah* yang secara khusus kata ini bermakna melakukan peperangan melawan orang kafir. (Mustarom, 2017)

Dalam kurun waktu lima tahun ini, Pangeran Diponegoro dan Belanda merupakan pihak utama yang terlibat secara langsung dalam proses peperangan. Di antara keduanya sama-sama mempertahankan kepentingan masing-masing. Belanda dengan pasukan elitnya lambat laun berhasil memukul mundur pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Berbagai strategi jitu pun juga telah diterapkan oleh Pangeran Diponegoro bersama pasukannya.

Perlawanan yang dilakukan Diponegoro yang disebut dengan Perang Jawa (1825-1830) merupakan perlawanan terbesar terhadap pemerintah kolonial di Jawa pada awal abad 19. Sejarawan Peter Carey menyebut perlawanan Diponegoro merupakan penanda diakhirinya tatanan lama di Jawa dan dimulainya jaman modern. Dalam pengertian ini Perang Jawa dapat dikatakan sebagai bagian dari perubahan besar yang melanda dunia di akhir abad 18 dan awal abad 19. (Kanumoyoso, 2014)

Perang yang berlangsung selama hampir lima tahun secara resmi berakhir melalui tipu daya, bukan melalui pertempuran yang menentukan. Nilai-nilai yang dianggap luhur oleh orang Jawa, yang juga dimiliki oleh Diponegoro dimanfaatkan de Kock sebagai kelemahannya lalu digunakan untuk menjatuhkan mereka, dan strategi de Kock benar-benar tepat sasaran. Bagi rakyat Kesultanan Yogyakarta, perang menimbulkan penderitaan lahir dan batin. Perubahan pascaperang yang paling penting adalah perubahan batas wilayah antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Pada 25-27 September 1830 di Klaten, diadakan perjanjian perubahan batas wilayah.

Pertemuan itu dihadiri Sultan Hamengkubuwono V, van Sevenhoven (Komisaris untuk Keraton), J.F.W. van Nes (Residen Yogyakarta), Patih Danurejo dan Susuhunan Pakubuwono VI yang didampingi oleh Panembahan Buminoto, Panembahan Mangkurat dan Sosrodiningrat. Perubahan penting lainnya adalah Gubernur Jenderal van den Bosch, berdasarkan Resolusinya pada 18 Desember 1830, melarang Sunan dan Sultan menyelenggarakan gerbang pajak di wilayah dua kerajaan. Ia juga mencabut keputusan Gubernur Jenderal pendahulunya yang dimulai pada 1 Januari 1831 (Swantoro, 2002: 185-186).

Akhir peperangan itu memberikan Belanda sebuah kemenangan sehingga ia memiliki kekuasaan tanpa batas atas Pulau Jawa dan dengan berakhirnya perang tersebut menandakan bahwa kolonialisme secara resmi berlaku di Pulau Jawa. Untuk mengawali penjajahannya di Pulau Jawa, Belanda menerapkan sistem Tanam Paksa atau *cultuur stelsel* dibawah pemerintahan Johannes van den Bosch (1830-1848). (Carey, 2001).

Perang Jawa juga memberikan daya dorong untuk sebuah proses yang masih akan bergulir sendiri dalam Indonesia modern, yaitu intergrasi nilai-nilai Islam ke dalam identitas Indonesia masa kini.

D.Kesimpulan

Perang Jawa merupakan perang yang sangat besar. Perang ini menjadi titik awal kebangkitan masyarakat Jawa dalam melawan kedudukan Belanda dan bangsa Eropa lainnya di tanah mereka. Perang Jawa merupakan sebuah bukti nyata akan sifat nasionalisme dan patriotisme yang tertanam dalam diri Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak rela melihat tanah kelahirannya menjadi porak poranda karena moral Jawa yang selama ini diagung-agungkan justru ditinggalkan begitu saja karena pengaruh yang kuat dari bangsa Barat.

Sebuah negara yang kuat tentunya juga ada pemimpin yang kuat. Sebelum meletusnya Perang Jawa, masyarakat

Jawa kehilangan pegangan karena pemimpin mereka justru lebih memihak ke bangsa Eropa. Rakyat semakin sengsara karena norma-norma kehidupan Jawa mulai ditinggalkan oleh punggawa keraton, sehingga rakyat semakin tidak memperoleh perhatian dari pemerintah keraton.

Melihat hal ini Pangeran Diponegoro menjadi tergerak hatinya, sehingga muncullah gerakan-gerakan seperti gerakan Ratu Adil. Pangeran Diponegoro dipercaya menjadi bisa menjadi pemimpin rakyat dan bisa mengayomi mereka. Kemudian disusunlah berbagai rencana dan strategi yang matang sebelum terjun ke medan perang untuk menyerang pasukan Belanda yang semakin bertindak kurang ajar.

Kegagalan yang diderita oleh Diponegoro dan pasukannya, bukan karena tujuan dan metodenyang salah, tetapi karena kekuatan yang tidak seimbang. Tipu muslihat yang licik dan keji, yang hanyabisa dilakukan oleh orang-orang yang bermoralrendah dan jahat, ternyata telah menjadi watakkepribadian penguasa kolonial Barat di Indonesia.

Setelah berakhirnya Peran Jawa, Pulau Jawa secara resmi menjadi wilayah kedudukan kolonial Belanda. pangeran Diponegoro diasingkan. Rakyat semakin menderita karena kebijakan yang dikeluarkan Belanda semakin tidak memperhatikan peri kemanusiaan. Namun rakyat Jawa juga tidak tinggal diam, setelah berakhirnya Perang Jawa kemudian muncul pemberontakan-pemberontakan nasionalisme lainnya di tanah Jawa.

Daftar Referensi

- Carey, P. (2001). *Asal-Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Carey, P. (2018). *Sisi Lain Diponegoro: Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Djamhari, S. A. (2014). *Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel*

Benteng 1827-1830. Depok: Komunitas Bambu.

Kanumoyoso, B. (2014). Diponegoro Dalam Sejarah Nasional Indonesia, 1-8.

Kuncoro, N. G. P. (2013). *Peran Masyarakat Dekso Dalam Perang Jawa 1825 -1830*. skripsi. Universitas Sanata Dharma.

Mustarom, K. (2017). Negara Islam Tanah Jawa:Cita-Cita Jihadis Diponegoro. *Hijri*, 6(1). Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/hijri/article/view/1100>

Wiharyanto, A. K. (n.d.). Perlawanan Indonesia Terhadap Belanda.

Swantoro, P. 2002. *Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sugiyanto. 2010. Pengantar Ilmu Sejarah. Jember: Universitas Jember Press.

Wiharyanto, A. K. (n.d.). Perlawanan Indonesia Terhadap Belanda.